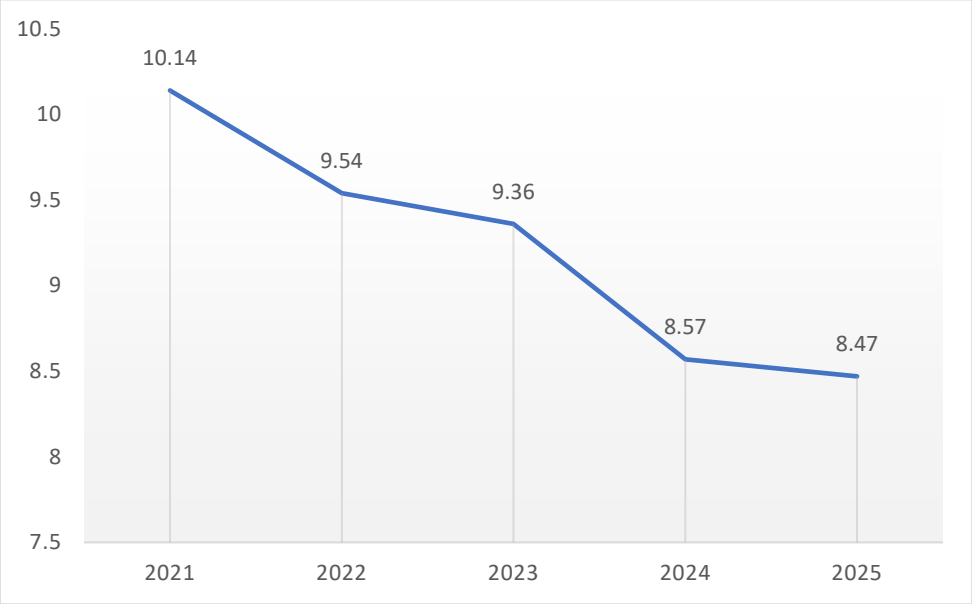
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan global yang belum terselesaikan. World Bank (2026) memperkirakan bahwa hingga tahun 2024, sebanyak 847 juta orang di seluruh dunia masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran di bawah 3 dolar AS per hari. Kemajuan pengentasan kemiskinan global mengalami stagnasi akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi, dampak pandemi COVID-19, dan meningkatnya kondisi kerapuhan di berbagai negara, sementara tingkat kemiskinan di negara-negara berpendapatan rendah bahkan masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Tantangan ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara termiskin di dunia, tetapi juga oleh negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekalipun. World Bank (2018) menegaskan bahwa pertumbuhan pendapatan rata-rata saja tidak cukup sebagai penanda pembangunan, karena manfaat pertumbuhan tidak selalu terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tidak terlepas dari persoalan kemiskinan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode 2021–2025 menunjukkan tren sebagai berikut.



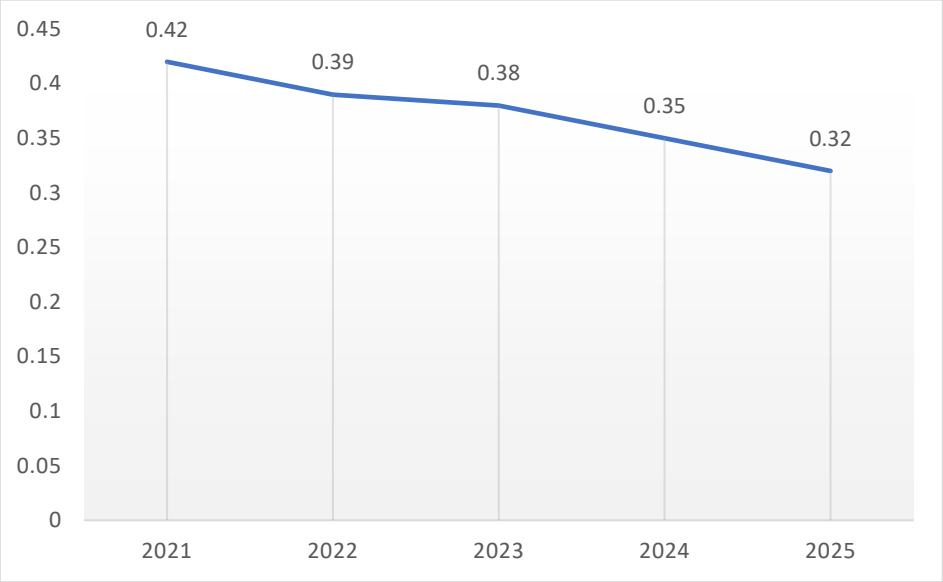
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 1 Tren Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021–2025

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin secara nasional terus mengalami penurunan, dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 8,47% pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi perekonomian pascapandemi COVID-19. Meskipun demikian, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan beratnya kondisi yang dialami oleh kelompok masyarakat yang paling miskin. Inilah yang mendorong pentingnya penggunaan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai ukuran yang lebih komprehensif. Indeks Keparahan Kemiskinan yang dikembangkan oleh Foster, Greer, dan Thorbecke (1984) tidak hanya mengukur jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengukur seberapa dalam dan seberapa timpang kondisi di antara kelompok penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar ketimpangan yang terjadi di dalam kelompok penduduk miskin, yang berarti kelompok termiskin berada dalam

kondisi yang jauh tertinggal bahkan dibandingkan dengan sesama penduduk miskin lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika sebagai berikut



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 2 Tren Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Tahun 2021–2025

Selain gambaran nasional, disparitas nilai P2 antarprovinsi juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi dengan nilai P2 tertinggi dan terendah, yang menunjukkan bahwa kondisi kelompok termiskin di berbagai wilayah sangat bervariasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas namun tetap representatif, Tabel 1.1 menyajikan lima provinsi dengan nilai P2 tertinggi dan lima provinsi dengan nilai P2 terendah.

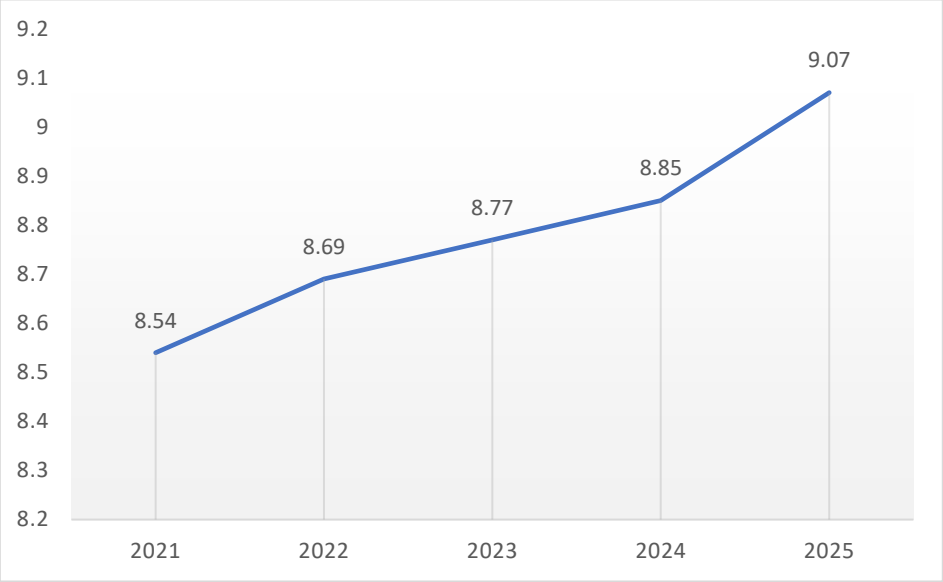
Tabel 1. 1 Lima Provinsi dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tertinggi dan Terendah di Indonesia Tahun 2025

Peringkat	Provinsi	IKK
5 Tertinggi		
1	Maluku	0.98
2	Nusa Tenggara Timur	0.74
3	Gorontalo	0.61
4	Sulawesi Barat	0.54
5	Aceh	0.52
5 Terendah		
1	Kalimantan Utara	0.05
2	DKI Jakarta	0.10
3	Kalimantan Tengah	0.11
4	Bali	0.13
5	Riau	0.15

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025),diolah

Perbedaan nilai P2 antara provinsi tertinggi dan terendah yang terlihat pada tabel di atas mengisyaratkan bahwa faktor-faktor penyebab keparahan kemiskinan bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Kondisi geografis, kualitas sumber daya manusia, iklim investasi, dan tata kelola pemerintahan yang berbeda-beda antarprovinsi turut berkontribusi pada disparitas keparahan kemiskinan yang begitu lebar. Setidaknya terdapat empat faktor yang secara logis dan empiris memiliki keterkaitan erat dengan keparahan kemiskinan di Indonesia, yaitu rata-rata lama sekolah, penanaman modal asing, indeks penilaian integritas, dan tingkat pengangguran terbuka.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengakses pasar kerja formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), rata-rata lama sekolah di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan tren sebagai berikut.



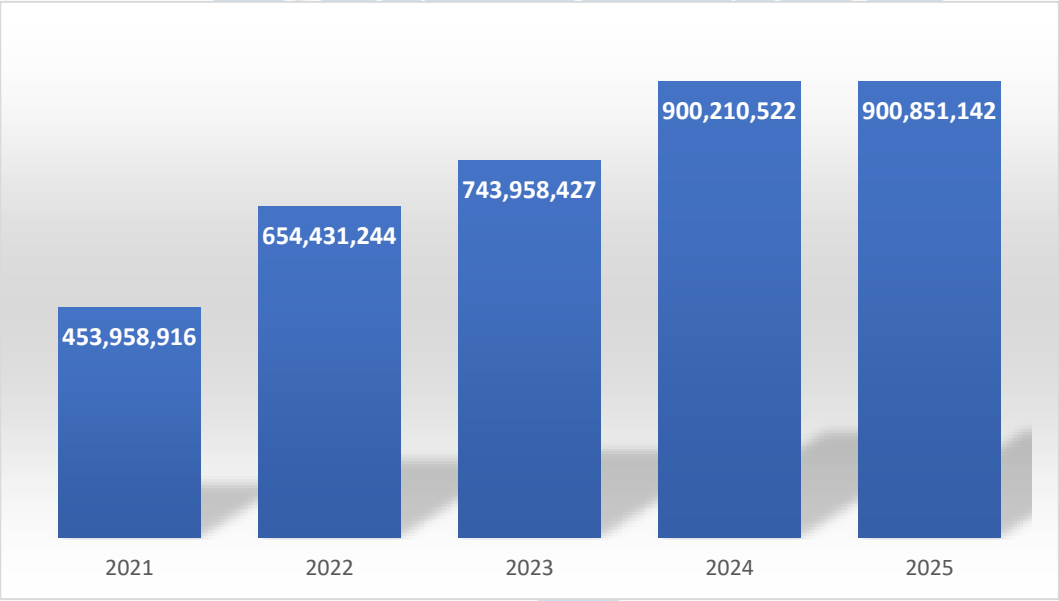
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 3 Tren Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2021–2025

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah secara nasional terus meningkat, dari 8,54 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,07 tahun pada tahun 2025. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antar provinsi. Kevin et al. (2022) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, yang mengonfirmasi bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu wilayah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), DKI Jakarta mencatat rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 11,59 tahun, sementara Kalimantan Barat mencatat nilai terendah sebesar 8,07 tahun, selisih yang mencapai lebih dari 3,5 tahun. Artinya, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kalimantan Barat hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama, jauh di bawah penduduk DKI Jakarta yang rata-rata telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah

menengah atas. Kesenjangan ini berimplikasi langsung pada perbedaan kapasitas produktif penduduk antardaerah karena individu dengan pendidikan lebih rendah cenderung terjebak di sektor informal dengan upah rendah, yang pada akhirnya turut memengaruhi tingkat keparahan kemiskinan di masing-masing provinsi.

Dari sisi investasi, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (2025), realisasi PMA di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan tren sebagai berikut.



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2025)

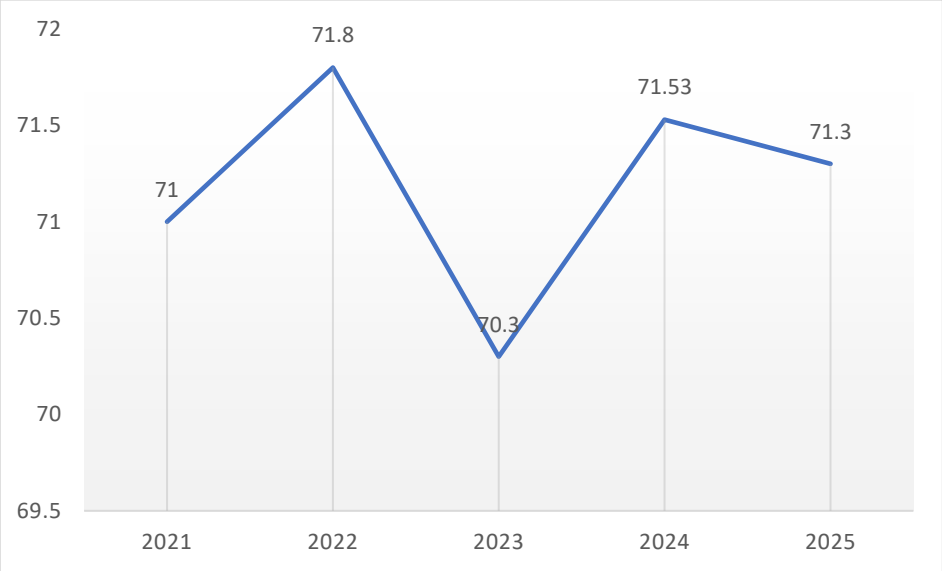
Gambar 1. 4 Tren Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2021–2025

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (2025), realisasi PMA di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama periode penelitian, dari Rp453,95 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp900,85 triliun pada tahun 2025. Namun,

peningkatan tersebut tidak disertai dengan distribusi yang merata antarwilayah. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa secara konsisten mendominasi penyerapan PMA, dengan porsi yang hampir tidak berubah yakni sekitar 47,5% pada tahun 2021 dan 47,6% pada tahun 2024. Pada tahun 2024, tiga provinsi teratas penerima PMA yakni Jawa Barat (Rp149,58 triliun atau 17,3% dari total nasional), DKI Jakarta (Rp113,45 triliun atau 13,1%), dan Banten (Rp58,02 triliun atau 6,7%) semuanya berada di Pulau Jawa. Sementara itu, provinsi-provinsi dengan nilai P2 yang tinggi justru mencatat realisasi PMA yang sangat rendah, seperti Sulawesi Barat yang hanya menerima Rp0,03 triliun (0,0%), Gorontalo Rp0,52 triliun (0,1%), dan Bengkulu Rp1,30 triliun (0,2%), (BKPM, 2025). Ketimpangan distribusi PMA yang begitu mencolok ini memunculkan pertanyaan penting apakah peningkatan PMA secara agregat benar-benar berdampak pada pengurangan keparahan kemiskinan, ataukah justru memperlebarnya karena manfaat investasi terkonsentrasi di wilayah yang sudah relatif lebih maju. Aloui et al. (2024) menemukan bahwa FDI mengurangi kemiskinan di Afrika dan Amerika Latin, namun dampaknya bersifat kondisional terhadap kualitas tata kelola negara penerima. Senada dengan itu, Bao & Dung (2026) menegaskan bahwa FDI tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan tanpa disertai kualitas tata kelola lokal yang memadai.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara negara memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan anggaran publik tersalurkan secara efektif kepada kelompok yang paling membutuhkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin mengukur integritas pemerintahan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menghasilkan Indeks Penilaian Integritas (IPI). Indeks ini mencerminkan seberapa baik

suatu instansi pemerintah dalam mengelola risiko korupsi dan menerapkan sistem antikorupsi dalam proses birokrasinya, dengan kategori penilaian mulai dari Rentan (0–72,9), Waspada (73–77,9), hingga Terjaga (78–100). Tren IPI di Indonesia selama periode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut.



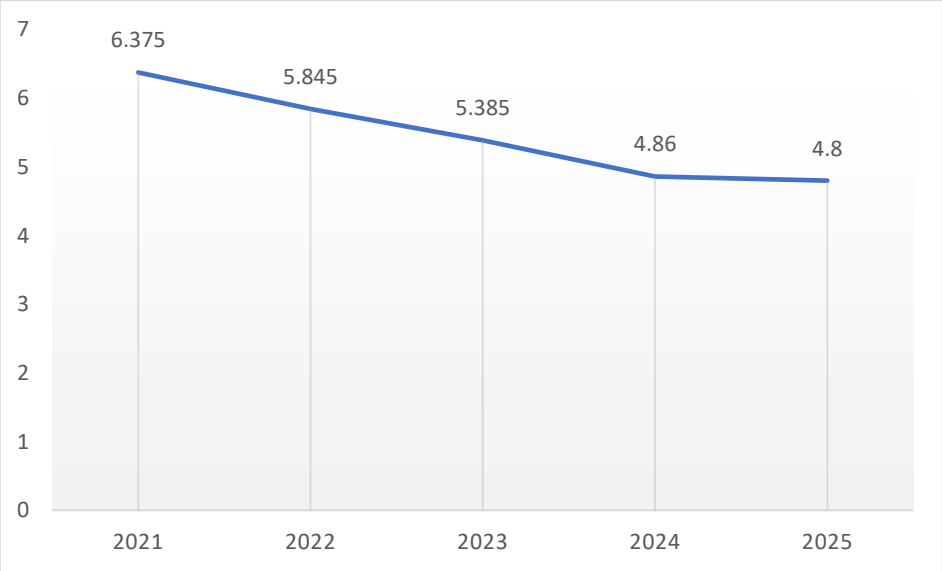
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2025)

Gambar 1. 5 Tren Indeks Penilaian Integritas di Indonesia Tahun 2021–2025

Berdasarkan data KPK, nilai IPI nasional selama periode 2021–2025 berfluktuasi dalam rentang 70,3 hingga 71,3 dan secara konsisten berada pada kategori Rentan, yakni di bawah ambang batas 73 (KPK, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dijalankan, integritas penyelenggara negara secara nasional belum mencapai tingkat yang memadai untuk memastikan distribusi anggaran publik berjalan secara optimal. Lemahnya integritas ini berpotensi menghambat efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang membutuhkan ketepatan sasaran dan akuntabilitas tinggi dalam penyalurannya kepada kelompok masyarakat yang

paling rentan. Khasanah (2021) menemukan bahwa tata kelola pemerintahan merupakan variabel paling dominan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana semakin buruk kinerja tata kelola pemerintahan maka tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan besarnya porsi angkatan kerja yang belum terserap pasar kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), TPT di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan tren sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 6 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2021–2025

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami penurunan yang konsisten, dari 6,375% pada tahun 2021 menjadi 4,80% pada tahun 2025. Meskipun tren penurunan tersebut mencerminkan perbaikan penyerapan tenaga kerja selama masa pemulihan pascapandemi COVID-19, penurunan ini tidak serta merta diikuti oleh

perbaikan kondisi kelompok masyarakat yang paling miskin. Hal ini terjadi karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja di Indonesia berlangsung di sektor informal. Berdasarkan data BPS, proporsi pekerja informal di Indonesia justru meningkat dari 59,62% pada tahun 2021 menjadi 60,12% pada tahun 2023, dengan rata-rata pendapatan bersih hanya sebesar Rp1,86 juta per bulan (BPS Sakernas, 2022), angka yang sangat dekat bahkan di bawah garis kemiskinan di beberapa provinsi. Dengan demikian, meskipun seseorang bekerja, mereka tetap rentan berada dalam kondisi kemiskinan yang parah karena kualitas pekerjaan yang sangat rendah. Kondisi inilah yang menjadikan hubungan antara TPT dan keparahan kemiskinan tidak selalu bersifat linier dan menegaskan pentingnya melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi pengangguran semata. Lismana & Sumarsono (2022) menemukan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, dengan argumentasi bahwa tidak semua individu yang menganggur secara otomatis tergolong miskin karena sebagian masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber pendapatan lain.

Berdasarkan seluruh fenomena yang telah diuraikan di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara upaya pembangunan yang dilakukan dengan kondisi sesungguhnya yang dihadapi oleh kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Dari sisi variabel, penelitian ini menggunakan Indeks Penilaian Integritas (IPI) yang belum pernah digunakan secara spesifik dalam analisis keparahan kemiskinan antarprovinsi di Indonesia. Dari sisi variabel dependen, penelitian ini menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih sensitif dibandingkan dengan *Headcount Index* (P0) yang

umum digunakan dalam literatur kemiskinan di Indonesia. Dari sisi metode dan periode, penelitian ini menggunakan regresi data panel 32 provinsi dengan cakupan tahun 2021–2025 yang merupakan periode pemulihan pascapandemi yang belum banyak dikaji dalam penelitian keparahan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, penanaman modal asing, indeks penilaian integritas, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks keparahan kemiskinan di 32 provinsi Indonesia pada tahun 2021–2025, dengan harapan hasilnya dapat menjadi rujukan yang konkret bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berbasis bukti empiris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025?
3. Bagaimana pengaruh indeks penilaian integritas terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penanaman modal asing terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks penilaian integritas terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan faktor rata-rata lama sekolah, penanaman modal asing, indeks penilaian integritas, dan tingkat pengangguran terbuka secara terpadu dan berbasis bukti empiris.
2. Dapat menambah wawasan dan literatur mengenai faktor-faktor penentu keparahan kemiskinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dimensi pendidikan, investasi, tata kelola pemerintahan, dan ketenagakerjaan.

3. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.
2. Diduga variabel penanaman modal asing berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.
3. Diduga variabel indeks penilaian integritas berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.
4. Diduga variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 2021–2025.

1.6 Sistematika Penelitian

Rencana sistematis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini menjelaskan dan menguraikan landasan teori serta bukti empiris dari penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III adalah bagian metodologi penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, alat analisis dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan hasil estimasi model dan pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data, serta interpretasinya terhadap fenomena keparahan kemiskinan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari rangkaian penelitian dan memberikan saran kepada pemangku kepentingan yang relevan dengan penelitian ini.